



Trinitas di Antara Subaltern dan Politik Egaliter

Lidia Theresia

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta
aveshemma@gmail.com

Abstract: Colonialism in human civilization has caused comprehensive problems in all aspects of life, including gender issues. Gayatri Chakravorty Spivak, one of the literary critics, said that colonialism gave rise to a new inferiority with Eurocentrism. When Europe became the locus of power, women outside European nations were increasingly oppressed and became third-world women, which Spivak calls subaltern. The church, also formed due to colonialism, must not take advantage of itself but must be critical in highlighting social inequality. The presence of the church must respond to social problems that occur among its people and support the creation of equality in human life. For this reason, this article will show that the church can answer subaltern problems through the doctrine of the Trinity and create equality or egalitarianism in people's lives. The discussion is carried out using a qualitative research method, which presents formulations of the doctrine of the Trinity by theologians. The explanation will then show the model of the Trinity that is present to answer the subaltern problem. Thus, through the Trinity, the church can provide theological answers to the struggles felt by humans.

Keywords: Church, Trinity, Colonialism, Subaltern

Abstrak: Kolonialisme yang terjadi dalam peradaban manusia telah menimbulkan permasalahan menyeluruh di segala aspek kehidupan, termasuk masalah gender. Gayatri Chakravorty Spivak, salah seorang kritikus sastra, mengatakan bahwa kolonialisme memunculkan inferioritas baru dengan Eropasentrisme. Ketika Eropa menjadi lokus kuasa, maka perempuan di luar bangsa Eropa semakin tertindas dan menjadi perempuan dunia ketiga, yang Spivak sebut sebagai subaltern. Gereja yang juga terbentuk akibat dari kolonialisme, tidak boleh mengambil keuntungan sendiri, melainkan harus bersifat kritis dalam menyorot ketimpangan sosial yang terjadi. Kehadiran gereja harus menjawab permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah umatnya, dan mendukung terciptanya kesetaraan dalam kehidupan manusia. Untuk itu, artikel ini akan memperlihatkan bahwa gereja mampu menjawab masalah subaltern melalui doktrin Trinitas, dan menciptakan kesetaraan atau egaliterisme dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang memaparkan rumusan-rumusan mengenai doktrin Trinitas para teolog. Pemaparan tersebut kemudian akan memperlihatkan model Trinitas yang hadir untuk menjawab masalah subaltern. Dengan demikian, melalui Trinitas gereja dapat memberi jawaban teologis atas pergumulan yang dirasakan oleh manusia.

Kata Kunci: Gereja, Trinitas, Kolonialisme, Subaltern

Pendahuluan

Dalam kajian pasca-kolonial, kelompok yang dimarginalkan atau dikucilkan dari komunitas atau dari sistem hirarki kolonial dikatakan sebagai *Subaltern*. Istilah ini dipopulerkan oleh Gayatri Chakravorty Spivak, yang meminjam dari Antonio Gramsci, dalam tulisannya yang berjudul *Can the subaltern speak?* (1994).¹ *Subaltern* bagi Spivak lebih dilihat sebagai bentuk “kesengajaan” atas hegemoni dominan yang terjadi dalam sosial, politik, ekonomi dan geografis melalui sistem hirarki imperialis/kolonial untuk menyingkirkan atau memarginalisasi kelompok-kelompok tertentu. Kemunculan hegemoni dipandang sebagai kehadiran subjek yang memiliki kuasa (*power*) dan mendominasi dalam sistem hirarki kolonial. Oleh karena itu, menurut Spivak masalah utama *subaltern* disebabkan oleh pembatasan akses bersuara melalui mekanisme yang dibangun oleh hegemoni, sehingga setiap orang dibawa semakin masuk ke dalam wacana dominan tanpa mereka sadari.²

Dalam pengertian ini, Spivak melihat bahwa mekanisme sistem hirarki kolonial bekerja dalam menciptakan sistem kelas dalam etnosentrisme, di mana bangsa Eropa sebagai lokus kekuasaan. Pun demikian, menurutnya *subaltern* sebagai suatu konsep dalam sistem hirarki kolonial tidak hanya menunjuk kepada pembagian kelas, namun lebih dari itu, yakni pembatasan akses kepada kelompok-kelompok tertentu. Tanpa adanya akses secara politik maupun sosial, maka kaum *subaltern* menjadi kelompok atau orang-orang yang tidak punya suara atau tidak dianggap dalam mengambil keputusan apapun dalam berbagai bidang kehidupan. Bukan karena kaum *subaltern* tidak bisa berbicara secara literal, melainkan karena bangsa kolonial tidak pernah ingin mendengar kaum *subaltern* tersebut.

Keadaan demikian membuat kaum *subaltern* dimanipulasi atau tanpa sadar telah direproduksi melalui sistem hirarki kolonial dengan ideologi kolonialnya. Ideologi dalam hal ini tidak dimengerti sebagai sebatas paham atau ajaran belaka, tetapi memiliki sifat represi dalam memberikan kepatuhan dan manipulasi atas realitas yang terjadi dengan adanya sistem kelas dan dominasi kelompok. Demikianlah keberadaan hegemoni atau dominasi kuasa terjadi dengan menghadirkan wacana utama dalam kelompok masyarakat, yang dikuatkan dengan dukungan dari bidang lain dalam sistem masyarakat, sehingga kekuasaan diperoleh dengan mereproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas dan hubungan sosial dalam masyarakat.³ Adanya konstruksi demikian, menjadikan kaum *subaltern* menjadi kaum yang tanpa disadari tidak

¹ Gayatri Chakravorty Spivak, *Can The Subaltern Speak?*, ed. Patrick Williams dan Laura Chrisman (New York: Colombia University Press, 1994), 66.

² Rahmat Setiawan, “Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak,” *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra* VI No. 1 (2018): 14.

³ Muh. Doyin Mafrukhi, Rustono, Subiyantoro, “Hegemoni Sosial, Budaya, dan Kekuasaan Wacana Sastra Buku Teks Bahasa Indonesia SMA,” in *Ceramah Universitas Negeri Semarang* (Semarang, 2019).

memiliki suara secara politik, tidak dianggap secara sosial dan tidak memiliki posisi subjek dalam kolonial. Mereka dibentuk menjadi orang-orang yang “pendiam”. Dalam tulisannya Spivak memberikan contoh-contoh kaum *subaltern*, yaitu: ras kulit hitam, orang miskin dan kaum perempuan.

Kate Millet dan Shulamith Firestone mengatakan bahwa, penindasan atau pelabelan rendah terhadap kaum perempuan terjadi akibat adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut secara biologis dan juga melalui konstruksi sosial yang dibangun masyarakat.⁴ Pemahaman ini senada dengan pemikiran Spivak ketika dia membahas mengenai kaum perempuan sebagai *subaltern*. Itu sebabnya, Spivak menekankan keterkaitan patriarki atau dominasi laki-laki dengan kolonialisme, yang saling melengkapi dalam menempatkan perempuan sebagai kaum *subaltern*. Keterkaitan tersebut menciptakan konstruksi sosial yang menempatkan kaum perempuan pada posisi inferior ketika berhadapan dengan dunia patriarki, dan menjadi perempuan ‘dunia ketiga’ ketika berhadapan dengan bangsa kolonial. Hal ini yang membuat perempuan tidak memiliki bahasa konseptual untuk berbicara, karena kaum laki-laki kolonial yaitu bangsa Eropa, maupun pribumi, tidak memberikan “telinga” bagi suara perempuan. Dengan kata lain, tidak ada ruang bagi kaum perempuan untuk mengartikulasikan dirinya. Ruang-ruang subjek dalam tatanan kolonialisme hanya diisi oleh formasi ideologis imperialis-maskulin.⁵ Akibatnya, meskipun kolonialisme telah berakhir namun kaum *subaltern* tetap ada, sebagai akibat dari wacana dan praktik-praktik kekuasaan yang dibangun selama ini.

Pemahaman ini senada dengan teori Michael Foucault yang mengatakan bahwa, hegemoni atau dominasi kuasa berlangsung dan tetap terpelihara melalui wacana yang mendominasi dengan penyebaran di berbagai bidang. Wacana tersebut kemudian menjadi sebuah kebenaran umum yang terus mengarahkan kelompok masyarakat pada kuasa dominan.⁶ Keadaan ini yang menyebabkan perempuan sebagai kaum *subaltern* tidak dapat bersuara, karena kebenaran umum dalam hegemoni tidak ingin mendengarkan. Untuk itu, diperlukan keinginan atau hasrat politik maupun sosial, untuk mengangkat posisi kaum *subaltern* dalam wacana maupun praktik-praktik kekuasaan. Upaya ini dilakukan dengan mereproduksi wacana dan praktik-praktik kekuasaan yang selama ini telah dibangun dalam dominasi kelompok tertentu, yakni maskulinitas dan bangsa kolonial. Hal ini berarti bahwa diperlukan dekonstruksi atas teks dan wacana, dalam rangka merekonstruksi suatu gagasan kehidupan politik dan sosial yang egaliter.

⁴ Fiona Anggraini Tiosuta, “Menelisik Potensi Feminis Para Lelaki,” *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 2 (2015): 167.

⁵ Leela Gandhi, *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat* (Yogyakarta: Qalam, 2006), vii.

⁶ Joko Priyanto, “Wacana, Kuasa, dan Agama dalam Kontestasi PilGub Jakarta (Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault),” *THAQĀFIYYĀT* 18 (2017): 193.

Artikel ini akan memperlihatkan bagaimana doktrin Trinitas dapat menjadi jalan bagi gereja untuk menyuarakan kesetaraan bagi kaum perempuan, baik sebagai perempuan “dunia ketiga”, maupun ketika berhadapan dengan maskulinitas. Ketika diketahui bahwa *subaltern* tetap terjadi melalui wacana yang dibangun oleh hegemoni atau dominasi kuasa, maka kehadiran artikel ini diharapkan akan menambah tafsiran teks-teks dogmatis, yang masih “kalah” dalam hal jumlah literatur, untuk membangun wacana yang egaliter.

Metode Penelitian

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif literatur, yang membahas seputar kaum *subaltern*. Melalui artikel ini akan diperlihatkan bagaimana kaum *subaltern* terbentuk dan menjadi kaum yang tidak dapat bersuara. Pembahasan tersebut dilakukan untuk memperlihatkan permasalahan yang dihadapi kaum *subaltern* dan kemudian mengemukakan ide agar kaum *subaltern* dapat menjadi subjek dalam ideologi dominan. Teologi Trinitas dalam artikel ini menjadi model relasi yang egaliter, dalam menjawab pergumulan tentang kesetaraan yang dirasakan kaum *subaltern*. Oleh karena itu, permasalahan kaum *subaltern* tersebut akan dijawab dengan memaparkan pandangan teologi Trinitas dari Jurgen Moltmann⁷, H. Richard Niebuhr⁸, dan Kathryn Tanner⁹, yang memiliki paradigma berbeda, untuk mencapai egaliter.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Doktrin dengan Tatanan Masyarakat

Ketika doktrin Trinitas dalam Kekristenan dihubungkan dengan wacana egaliter maka kedua hal ini disatukan dalam istilah ‘politik’. Istilah politik tidak serta merta merujuk kepada pemberaran atas suatu negara-bangsa, seperti yang dikatakan Plato dan Aristoteles tentang Athena dan Sparta¹⁰, melainkan dalam arti yang lebih luas berkaitan dengan tatanan masyarakat/komunitas atau tatanan hidup orang banyak. Itu artinya, dalam pengertian ini, bagaimana agar implikasi atas doktrin trinitas dalam hubungannya dengan politik dapat menciptakan wacana egaliter ditengah masyarakat menjadi pertanyaan yang penting untuk disorot.

Dalam sejarahnya, pengaruh doktrin agama sangatlah penting bagi tatanan masyarakat. Doktrin atau dogma berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “pendapat”,

⁷ Johannes P. Deetlefs, “Political Implication of The Trinity: Two Approaches,” *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 75(1), a5396 (2019): 1.

⁸ Frederick Christian Bauerschmidt, “The Trinity and Politics,” in *The Oxford Handbook of The Trinity*, ed. Gilles Emery. O.P dan Matthew Levering (New York: Oxford University Press, 2011), 2.

⁹ Kathryn Tanner, “Trinity,” in *The Wiley Blackwell Companion to Political Theology*, ed. William T. Cavanaugh dan Peter Manley Scott (Amerika Serikat: John Wiley & Sons Ltd., 2019), 368–371.

¹⁰ Robert Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy Second Edition* (New York: Cambridge University Press, 1999), 718.

“perkiraan” atau juga “gambaran”. Di dalam tradisi Alkitab, istilah dogma dapat diterjemahkan sebagai keputusan (Kis. 16: 4), ketetapan (Kis 17: 7), hukum taurat (Ef. 2: 15), surat hutang untuk mendakwa (Kol. 2: 14).¹¹ Dari deskripsi diatas dapat dikatakan istilah dogma/doktrin berkenaan dengan kehidupan manusia secara pribadi ataupun komunitas dan juga berkaitan dengan otoritas kekuasaan manusia. Misalkan saja sistem politik tunggal yang dianut kelompok atau bangsa-bangsa monoteisme bagaimanapun menekankan pada kesatuan Allah di dalam doktrin keagamaannya. Inilah juga yang terjadi, di mana doktrin Trinitas akan juga berperan dalam mempengaruhi tatanan masyarakat. Seperti yang dikatakan Nicholls (1989) dalam tulisannya Johannes P. Deetlefs, bahwa pengaruh tersebut memiliki hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi, yaitu antara pengalaman politik dalam mempengaruhi doktrin dan sebaliknya di mana doktrin itu sendiri yang mempengaruhi cara berpolitik.¹²

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kathryn Tanner, di mana dalam hubungan keterikatan antara doktrin (baca: kekristenan) dengan tatanan masyarakat terletak di dalam agama atau kekristenan itu sendiri sebagai gaya hidup, dan bukan hanya sebatas kepercayaan abstrak. Itulah sebabnya, menurut Tanner setiap teologi yang ada, ia katakan sebagai politik yang turut mempengaruhi tatanan sosial dan politik.¹³

Dari kedua pendapat ini antara Nicholls dan Tanner, maka dapat dikatakan bahwa bagaimanapun hubungan antara doktrin dan tatanan masyarakat memiliki keterkaitan melalui politik, tinggal bagaimana gambaran dari doktrin tersebut mengupayakan dan menghasilkan politik yang menghasilkan kehidupan masyarakat yang egaliter?

Politik Egaliter dalam Doktrin Trinitas

Dalam menciptakan tatanan masyarakat yang egaliter maka pengaruh yang dapat dilakukan oleh doktrin Kekristenan adalah melalui doktrin Trinitas. Konsep ini berbanding terbalik dengan doktrin monoteisme yang menekankan tidak adanya wakil Allah, akan menciptakan dan memproduksi struktur politik monolitis dan otoriter, di mana kuasa dipegang secara eksklusif oleh seorang pemimpin atau sebuah kelompok.¹⁴ Alih-alih menerima keberagaman dalam realitas, namun akan terjebak kepada konsep radikalisme.

Konsep Trinitas di dalam Kekristenan memberikan warna tersendiri bagi struktur politik egaliter dalam tatanan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam doktrin

¹¹ Lucien Van Liere, *Memutus Rantai Kekerasan: Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Dan Terorisme* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 6–7.

¹² Deetlefs, “Political Implication of The Trinity: Two Approaches.”

¹³ Ibid.

¹⁴ Tanner, “Trinity,” 365.

Trinitas tidak menekankan satu substansi, melainkan ada pada 3 pribadi, yaitu Allah, Anak dan Roh Kudus. Dengan 3 pribadi tersebut maka Trinitas, menurut Jurgen Moltmann, akan menekankan pada sikap inklusif dan persamaan yang dapat menghasilkan sikap demokratis dan politik pluralism.¹⁵ Namun demikian bagi sebagian ahli, pengaruh doktrin Trinitas terhadap tatanan politik egaliter masih dapat diperdebatkan karena akan terbentur dengan kesulitan dalam memahami doktrin tersebut oleh manusia dan juga dianggap terlalu rumit menjadi konsep dari tatanan politik yang egaliter. Paling tidak dari berbagai macam paradigma mengenai doktrin Trinitas dalam hubungannya dengan politik yang egaliter, maka pandangan Jurgen Moltmann, H. Richard Niebuhr dan Kathryn Tanner dapat mewakili perbedaan paradigma tersebut.

Jurgen Moltman

Menurut pandangan Jurgen Moltmann, Teolog asal Jerman, pengaruh dari doktrin Trinitas kepada politik egaliter dapat tercapai dengan melihat konsep Trinitas. Karena menurutnya dalam konsep tersebut ada pribadi dalam Tritunggal yang bukan bersifat individu, melainkan memiliki hubungan pribadi yang satu dengan yang lain. Setiap sosok di dalam pribadi tersebut ada dalam terang sosok lainnya dan menerima kepuuhan hidup abadi dari sosok yang lainnya. Gambaran ini adalah sebagai kebajikan pengorbanan cinta.¹⁶

Pandangan Moltmann mengenai doktrin Trinitas terletak kepada hubungan antarpribadi dalam ketritunggalan. Hal inilah yang akhirnya dalam Trinitas, Moltmann menekankan sifat sosial Allah. Allah adalah "Kasih" karena Allah tidaklah bersifat menyendiri/sendiri, melainkan "komunitas keilahian yang unik melalui pengorbanan satu dengan yang lainnya" Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi satu melalui Kasih abadi dan kesatuan mereka terdiri atas keesaan satu dengan yang lainnya. Allah Tritunggal membentuk kesatuan komunitas melalui hubungan yang erat antara ketiga-Nya, dan tiap pribadi adalah sama pentingnya dengan dua pribadi yang lain, namun bukan dengan pertengangan antara satu dengan yang lain dalam hal adu kuasa atau berebut hak untuk memiliki. Hubungan yang terjalin antara ketiga Pribadi dalam Allah Tritunggal disebut sebagai *perichoresis*, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai *circumincessio*, yaitu sebuah proses kehidupan yang terjadi di dalam diri Allah Tritunggal melalui pertukaran energi. Allah Bapa memiliki eksistensi-Nya di dalam Sang Putra, Sang Putra memiliki eksistensi-Nya didalam Bapa, dan kedua-Nya memiliki eksistensi mereka di dalam Roh Kudus. Berdasarkan kasih yang kekal di dalam ketiga-

¹⁵ Deetlefs, "Political Implication of The Trinity: Two Approaches."

¹⁶ Ibid.

Nya mereka hadir dan hidup dalam kedua Pribadi yang lain, sehingga ketiga-Nya adalah satu.¹⁷

Implikasi pandangan Moltmann mengenai Trinitas ini berada dalam hubungan manusia dengan sesama (the other) dan hubungan tersebut berada di dalam cinta kasih diantara Bapa dan Anak melalui Roh Kudus yang menciptakan ruang bagi manusia untuk dapat diangkat ke dalam rangkul Allah. Dengan demikian Trinitas menampilkan kasih dalam pengorbanan, persamaan dan kemurahan hati tanpa batas, yang membuat Allah lebih dikenal dengan kasih-Nya dibandingkan ke-Maha Kuasaan-Nya. Ketika manusia mengenal konsep Trinitas dengan cara yang demikian, maka manusia dapat meneladani-Nya dalam hubungan antarmanusia yang kemudian akan menciptakan masyarakat yang sesuai dengan gambaran Allah yaitu menekankan pada kasih, persamaan dan kemurahan hati. Konsep seperti ini menurut Moltmann dikenal sebagai Trinitas Ekonomi.¹⁸ Dengan kata lain dalam Trinitas Ekonomi hubungan antara Anak dan Bapa, digambarkan sebagai seseorang yang patuh, seorang yang mengorbankan diri.¹⁹

Dengan pandangannya ini, maka menurut Moltmann akan membawa kepada hidup berdampingan diantara sesama manusia. Doktrin Trinitas yang menekankan relasi antarpribadi serta kasih yang abadi akan membawa kepada politik yang saling setara serta saling menghargai. Keberagaman dalam realitas dianggap sebagai pribadi yang juga saling berhubungan. Dengan pandangannya ini ia sangat keras mengkritik konsep radikal monoteisme yang menolak keragaman, serta menciptakan konsep struktur monolitis.

H. Richard Niebuhr

Berbeda dengan Moltman, H. Richard Niebuhr, seorang Teolog Protestan Amerika, tidak melihat doktrin Trinitas secara teologis. Pendekatan Niebuhr ini dipengaruhi oleh filsuf Immanuel Kant yang menyatakan bahwa Trinitas tidak memiliki relevansi secara moralitas: "...whether we are to worship three or ten persons in the Deity makes no difference."²⁰ Maka dari itu menurut Niebuhr relevansi doktrin Trinitas haruslah yang tidak membahas dan berbicara tentang Tuhan, melainkan haruslah mengarah kepada pendekatan doktrin antropologi.²¹

Dengan pendekatan ini maka menurut Niebuhr, doktrin Trinitas harus membahas pada hal-hal yang praksis dan bukan sesuatu yang abstrak. Ia pun menawarkan bahwa untuk mencapai hal ini maka doktrin Trinitas harus membahas

¹⁷ Yudha Tianto, "Doktrin Allah Tritunggal Dari Jürgen Moltmann dan Permasalahannya," *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* No. 2 (2013): 160.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Tanner, "Trinity," 366.

²⁰ Bauerschmidt, "The Trinity and Politics."

²¹ Ibid.

mengenai “*hubungan Yesus Kristus dengan pencipta alam semesta dan dengan pemerintahan dalam sejarah seperti halnya dengan Roh Kudus yang hadir dalam ciptaan dan persekutuan orang Kristen*”. Dengan hal ini maka akan melibatkan 3 sumber yaitu: Alam, Sejarah dan Pengalaman yang sesuai dengan pengetahuan agama, di mana kesatuan Allah Bapa berfokus pada hal penciptaan dan hukum alam; kesatuan Allah Anak berfokus pada hal keselamatan, penebusan dan khotbah di bukit; serta Allah Roh Kudus berfokus pada pengalaman diantara pribadi dan persekutuan. Oleh karena itu bagi Niebuhr doktrin Trinitas adalah cara menyeimbangkan kesatuan diantara hukum alam, pengajaran Yesus dan Kesadaran Diri.

Ketika kehidupan praksis Kristen hanya didominasi oleh salah satu pribadi dalam Trinitas maka akan terjadi ketidakadilan dalam kehidupan, karena umat Kristen tidak hanya membutuhkan hukum alam yang akan membawa kepada sifat tradisionil tetapi juga memerlukan pengajaran Yesus, dan pengajaran Yesus pun harus diseimbangkan dengan kesadaran dalam diri serta pengalaman kontemporer. Hanya ketika hal itu berjalan seimbanglah konflik yang ada diantara tuntutan atau permintaan dari alam dan Gereja dapat dihindarkan.²²

Doktrin Trinitatis yang anthropologis menurut Niebuhr ini dapat menciptakan politik yang bersifat egaliter dengan mengedepankan faktor keseimbangan disetiap tuntutan atau permintaan. Selain, mudah dipahami dengan menjauhkan dari sisi abstrak dari Doktrin Trinitatis, namun demikian hal ini justru berbanding terbalik dengan Moltmann yang lebih cenderung mengedepankan sisi teologisnya. Kedua Teolog ini dapat memberikan warna bagi wacana politik dalam doktrin Trinitas.

Kathryn Tanner

Satu tokoh lain yang memiliki warna tersendiri dalam melihat doktrin Trinitas dalam hubungannya dengan politik adalah Kathryn Tanner, seorang teolog asal Amerika Serikat. Dalam artikelnya berjudul *Trinity* (2019), Tanner dengan tegas menolak gagasan mengenai doktrin Trinitas yang dijadikan sebagai model terbaik untuk menggambarkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Menurutnya Trinitas tidak memberi gambaran yang jelas tentang hubungan antar manusia. Beberapa hal yang menjadi dasar penolakannya adalah:²³

Pertama, Tanner menekankan bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya memahami bahasa metaforis yang mereka pakai untuk menggambarkan Trinitas. Jika demikian bagaimana manusia dapat meneladani hal yang tidak sepenuhnya dipahaminya? Dalam hal apakah setiap pribadi dalam Trinitas sama dan dalam hal apakah mereka berbeda? Dengan begitu banyaknya pertanyaan ini menunjukkan

²² Ibid.

²³ Tanner, “Trinity,” 368–371.

bahwa manusia memang tidak dapat sepenuhnya memahami Trinitas. Penolakannya ini sama dengan gagasan Immanuel Kant dan Richard Niebuhr ketika doktrin Trinitas dibahasakan ke dalam bahasa manusia yang justru menimbulkan masalah tersendiri.

Penolakannya yang kedua adalah penolakannya terhadap Jurgen Moltman yang mengatakan hubungan antarpribadi dalam Trinitas terjadi dengan pemahaman yang penuh terhadap satu sama lain. Menurut Tanner, hal ini akan menjadi masalah karena bertolak belakang dengan realitas manusia, di mana pemahaman yang ada antarmanusia dalam hubungannya dengan sesama tidak pernah bisa penuh satu sama lain. Jika demikian sangatlah tidak mungkin bagi manusia memakai Trinitas sebagai model dalam hubungannya dengan politik egaliter.

Ketiga, hubungan dalam dunia Trinitatis diisi dengan kedamaian, persamaan, cinta yang sempurna, sementara hubungan dalam dunia manusia penuh dengan penderitaan, konflik dan dosa. Perbedaan ini tentunya membuat Trinitas adalah hal yang tidak realistik dalam hubungan manusia. Kritiknya ini dapat menjadikan doktrin Trinitas menjadi sesuatu yang tidak realistik untuk diterapkan dalam kehidupan manusia dan masyarakat.

Ketiga dasar penolakan Tanner ini menunjukkan bahwa hubungan yang ada dalam Trinitas sangat jauh berbeda dengan hubungan yang ada diantara manusia. Trinitas mengandung hubungan yang bersifat *perichoretic* atau saling terkait satu dengan yang lainnya, justru tidak berlaku dalam hubungan antara manusia. Yesus yang hadir di dunia membawa karya keselamatan, yang juga sangat berbeda dengan karakter manusia. Oleh karena itulah Tanner menekankan bahwa doktrin Trinitas tidak dapat menjadi rekomendasi yang realistik untuk politik yang egaliter.²⁴ Akan tetapi, salah satu pribadi dalam Trinitas dapat menjadi jalan masuk yang lebih realistik, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai salah satu pribadi dalam Trinitas adalah gambaran Allah sepenuhnya, sehingga dengan menjadi bagian dari Yesus Kristus manusia memperoleh jalan masuk kepada kehidupan bersama Allah (Trinitas). Melalui Inkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus sisi kemanusiaan dan keilahian menjadi satu, sehingga manusia diberikan sebuah harapan bahwa suatu hari akan diangkat kepada kehidupan ilahi tersebut melalui Yesus Kristus. Dengan demikian kehidupan bersama dengan Yesus Kristus akan membawa manusia mencapai gambaran Allah tersebut.²⁵

Tanner berpendapat bahwa hubungan yang ada diantara Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus (Trinitas) bukanlah hadir ke dunia untuk dijadikan model hubungan

²⁴ Gagasan *perichoretic* sering dijadikan sebagai model politik egaliter, di mana gagasan ini mengarahkan kepada Trinitarianisme Sosial. Adanya nilai-nilai yang menjadikan kesatuan antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itulah yang diterapkan di dalam hubungan dengan sesama manusia, seperti kasih, empati, kesamaan, dsb. Teolog yang mengembangkan gagasan ini adalah Andrei Rublev. Frederick Christian Bauerschmidt.

²⁵ Deetlefs, "Political Implication of The Trinity: Two Approaches."

antarmanusia atau konsep dalam tatanan masyarakat, melainkan hadir ke dunia sebagai manusia melalui Yesus sehingga manusia dapat berbagi kehidupan dan menjadi satu dengan-Nya. Ketika manusia menyatu dengan Kristus tentunya akan membawa perubahan dalam hubungannya dengan manusia lain. Demikian juga sebaliknya, di mana ketika menyatu dengan Kristus, yang memiliki kesatuan Ilahi dan manusia didirinya, maka manusia tergabung ke dalam kehidupan Trinitas dan kemudian diubah menjadi gambaran Kristus.²⁶ Berdasarkan pemahaman ini, memahami relasi Trinitas sebagai model relasi kesetaraan dapat direalisasikan melalui Yesus Kristus atau Kristologi.

Masalah Subaltern dalam Trinitas

Berdasarkan beberapa pandangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketiga teolog tersebut memiliki cara pendekatannya masing-masing untuk memahami doktrin Trinitas dalam kaitannya dengan politik, namun ketiganya sepakat dalam hal memakai doktrin Trinitas untuk memproduksi wacana politik egaliter dalam tatanan masyarakat. Sebenarnya, masih banyak pandangan-pandangan lain dari para teolog tentang hal tersebut, namun demikian ketiga teolog tersebut dapat mewakili berbagai pemahaman tentang hubungan doktrin Trinitas dengan politik. Jurgen Moltmann dengan penjelasannya tentang Trinitas menghadirkan hubungan/relasi antara Allah, Anak dan Roh Kudus sebagai konsep dalam mengatur tatanan masyarakat yang saling berelasi. Demikian juga dengan Niebuhr yang melihat relasi Trinitas secara praksis dengan membahasakannya ke dalam anthropologi: Alam, sejarah dan pengalaman. Meskipun Niebuhr tidak membahas secara teologis atau bahkan meninggalkan doktrin Trinitas itu sendiri, namun intinya, faktor keseimbangan menjadi kunci dalam mewujudkan model politik yang egaliter. Teolog terakhir adalah Kathryn Tanner, yang melihat doktrin Trinitas melalui Kristologi, untuk dapat dijadikan model di dalam mewujudkan politik yang egaliter.

Memang ketika gagasan ketiga teolog di atas diperhadapkan dengan masalah kolonialisme, yaitu kaum *subaltern* maka ketiganya dapat menjawab mengenai hal politik egaliter, di mana pribadi-pribadi dalam Trinitas dapat menciptakan ruang antara satu dengan yang lain dalam keharmonisan, dan menegaskan praktik-praktik *superior* dan *inferior* dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian untuk menjawab masalah kaum *subaltern*, dalam hal ini kaum perempuan yang berada di dalam dua masalah besar, yakni pertama menjadi perempuan ‘dunia ketiga’ ketika berhadapan dengan bangsa Eropa, dan menjadi kaum inferior ketika berhadapan dengan kaum laki-laki pribumi, maka diperlukan doktrin Trinitas yang lebih realistik dalam mengangkat kaum subaltern. Karena bagaimanapun, menurut Spivak kaum *subaltern* adalah

²⁶ Tanner, “Trinity,” 372.

golongan kaum yang tidak dapat berbicara dan tidak pernah didengarkan, sehingga diperlukan agen atau kaum intelektual untuk mengangkat kaum *subaltern* tersebut.

Politik egaliter yang dihadirkan dalam doktrin Trinitas tidaklah tepat jika hanya menawarkan “konsep besar” mengenai hubungan relasi antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti yang ditawarkan Moltmann. Hal demikian akan menjadikan satu konsep tunggal (mono) yang abstrak seperti yang dikhawatirkan Tanner, serta tidak akan mengubah apapun bagi para bangsa Eropa sebagai bangsa yang pernah menjajah. Itu sebabnya Johannes P. Deetlefs mengatakan bahwa masalah terbesar kolonialisme adalah Eropasentrisme, di mana ras bangsa Eropa menjadi ras yang *superior* di antara ras-ras lainnya, seperti Asia, Afrika, Australia, dsb. Munculnya kolonialisme dianggap sebagai jalan “pengadaban” kepada masyarakat pribumi yang mengalami penjajahan aturan dan hukum pribumi, yang digantikan dengan aturan bangsa Eropa.²⁷ Dengan pemahaman ini, kemunculan kaum *subaltern* adalah akibat dari kolonialisme, yang membuat aturan dan hukum baru dari bangsa Eropa, yang kemudian justru dijustifikasi dalam bentuk “pengadaban” melalui Kristenisasi. Itu sebabnya, doktrin Trinitas yang menghadirkan model relasi 3 pribadi Allah, diperlukan sebagai jawaban atas permasalahan *subaltern* ini. Kehadiran doktrin Trinitas sebagai model relasi kesetaraan, dapat menjadi jalan untuk mereproduksi gagasan “pengadapan” versi kolonialisme yang selama ini tersebar juga melalui Kristenisasi.

Pandangan Niebuhr yang menekankan “ilustrasi” atau “gambaran lain” dari doktrin Trinitas, sebagai alam, sejarah dan pengalaman, justru terjebak di dalam konsep baru mengenai Trinitas tanpa menjawab masalah kaum *subaltern*. Gambaran mengenai keseimbangan dalam doktrin Trinitas Niebuhr sama halnya dengan Moltman, hanya menggambarkan konsep besar dari politik egaliter tanpa dapat diimajinasikan secara secara kolektif-praksis dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal teologi yang tidak menyentuh masyarakat sebagai realitas sosial, akan sulit untuk diartikulasikan dalam kehidupan manusia.²⁸

Dengan demikian, permasalahan dalam kaum *subaltern* di tengah masyarakat adalah tentang bagaimana mengangkat kaum *subaltern* menjadi bagian dari masyarakat. Dalam hal ini diperlukan agen, baik itu kaum intelektual, agamawan dsb, agar dapat didengarkan oleh kelompok dominan serta menjadi bagian komunitas yang egaliter. Oleh karena itu, doktrin Trinitas yang ditawarkan Tanner menurut saya lebih realistik dalam menjawab masalah tersebut, karena dengan pendekatan Kristologi yang dibuat oleh Tanner, doktrin Trinitas menjadi realistik dalam menghadirkan politik yang egaliter. Inilah yang dibutuhkan untuk mengangkat kaum *subaltern* sebagai kaum yang dimarginalisasi, dan yang tidak memiliki posisi sebagai subjek dalam praktik-praktik

²⁷ Deetlefs, “Political Implication of The Trinity: Two Approaches.”

²⁸ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy (Toward a Radical Democratic Politics)* (New York: Verso, 2014), 110.

kekuasaan apapun. Bahan pemikiran kemudian adalah tentang bagaimana Kristologi tersebut dihadirkan dalam konteks-konteks sosial tertentu.

Dari gagasan ini, maka saya memandang bahwa politik yang egaliter tidak akan dapat dijalankan menjadi tatanan di dalam masyarakat, jika tidak menghadirkan keadilan bagi kaum *subaltern*. Itu artinya, kaum perempuan yang tertindas karena adanya superioritas bangsa Eropa dan sikap otoritas patrikhal akan tetap menjadi kaum *inferior* selama tidak terjadi realisasi keadilan dalam masyarakat. Wacana-wacana politik egaliter yang didengungkan pun hanya menjadi bayang-bayang cita-cita masyarakat yang tidak akan terrealisasi, atau bahkan hanya berujung kepada bentuk mistifikasi dari realitas sosial masyarakat (Karl Marx); bahwa politik egaliter itu seolah-olah terjadi.

Pandangan Tanner mengenai Kristologi sebagai jalan masuk menuju Trinitas, menjadikan Yesus Kristus sebagai salah satu pribadi dalam Trinitas, yang mengangkat manusia memperoleh jalan masuk kepada kehidupan bersama Allah (Trinitas). Berdasarkan pandangan ini, saya dapat menggambarkan bahwa kehadiran Kristus adalah gambaran keadilan yang membawa pada kehidupan masyarakat yang egaliter, seperti yang digambarkan dalam hubungan tiga pribadi Trinitas (*perichoresis*).

Gagasan yang ditawarkan Tanner melalui Kristologinya, menurut saya lebih fleksibel dan realistik, di mana Yesus-Sejarah adalah wajah keadilan yang dapat dikontekstualisasikan dalam menjawab masalah-masalah pasca-kolonialisme. Intinya, paling tidak, sebagai suatu doktrin atau dogma maka persoalannya bukan hanya kepada masalah tradisionil atas dogma tersebut pada masa lalu, tetapi juga kepada masa yang akan datang melalui wacana-wacana kontekstualisasi.

Ada beberapa tawaran saya dari gagasan kristologi yang kontekstual tersebut, diantaranya:

Pertama, Yesus Kristus sebagai agen perubahan yang mengangkat kaum *subaltern*. Kisah-kisah Yesus yang mengangkat kaum *subaltern* (Yoh, 8: 1-11; Luk. 7: 11-17, dsb) adalah kisah yang menggambarkan peran Yesus yang melakukan keadilan dengan mengangkat kaum *inferior*, dalam artikel ini adalah perempuan, di hadapan kaum dominan atau penguasa, kaum Farisi.

Kedua, Yesus yang menerima keragaman. Kisah-kisah Yesus yang mengedepankan kasih dan egaliter (Luk. 10: 33; 17: 16; dsb) dari pada masalah etnosentrisme atau chauvinisme memberikan gambaran melalui Yesus, sehingga politik egaliter dalam Trinitas dapat dipahami dalam konteks bermasyarakat. Tidak ada pembedaan terhadap perempuan dunia ketiga atau pembedaan ras suatu bangsa-bangsa.

Kedua pandangan ini memberikan tawaran kepada penjajah, yaitu bangsa Eropa dan juga kepada yang dijajah, yaitu bangsa pribumi, untuk dapat menciptakan politik egaliter dalam tatanan masyarakat.

Kesimpulan

Kemunculan kaum subaltern sebagai dampak kolonialisme, dibangun melalui konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior. Konstruksi yang terbentuk dari keterkaitan antara patriarkhi dan kolonialisme tersebut, terpelihara melalui wacana yang senantiasa tersebar dalam berbagai bidang. Itu sebabnya, wacana tersebut harus direkonstruksi dengan menghadirkan gagasan atau wacana egaliter. Dalam hal inilah gereja harus menyuarakan kesetaraan, bagi kaum perempuan yang tertindas, melalui doktrin Trinitas. Akan tetapi, teologi tersebut harus dapat dipahami ketika diperhadapkan dengan konteks bermasyarakat, sehingga dapat diterima dan diterapkan.

Pemahaman ini mengarahkan penulis melihat sebagaimana yang dikatakan oleh Kathryn Tanner, bahwa memahami konsep doktrin Trinitas akan sulit untuk dilakukan tanpa kristologi, karena bersifat abstrak. Itu sebabnya, Tanner menekankan pentingnya Kristologi sebagai jembatan untuk memahami Trinitas tersebut. Meskipun demikian, Kristologi tersebut juga harus dapat lebih realistik dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat menuju tatanan egaliter, sehingga diperlukan penambahan Kristologi yang kontekstual dalam menjembatani hal tersebut. Hal ini dikarenakan, masalah-masalah dalam pasca-kolonial yang dihadapi kaum perempuan subaltern adalah masalah perempuan dunia ketiga, dan masalah inferior terhadap laki-laki pribumi, yang haruslah dijawab dengan konsep kristologi tersebut.

Dua tawaran saya untuk menjawab tersebut adalah Kristus sebagai agen perubahan dengan mengangkat kaum *subaltern*, dan juga Kristus yang menerima keragaman sebagai jawaban dalam menghadirkan politik yang egaliter, yaitu dengan melakukan keadilan untuk mengangkat kaum perempuan *subaltern*, dan juga menegasikan perempuan ‘dunia ketiga’ dan posisi perempuan yang *inferior*, di hadapan kaum laki-laki pribumi.

Intinya, melalui model Kristologi kontekstual dapat dipahami kesatuan egaliter Trinitas antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena bagaimanapun, kehadiran Yesus adalah jalan menuju Allah dan menjadi pengutusan kepada Roh Kudus, sehingga melalui Kristologi maka Trinitas dapat dipahami dan diterapkan.

Referensi

Bauerschmidt, Frederick Christian. “The Trinity and Politics.” In *The Oxford Handbook of The Trinity*, edited by Gilles Emery. O.P dan Matthew Levering, 200. New York:

- Oxford University Press, 2011.
- Deetlefs, Johannes P. "Political Implication of The Trinity: Two Approaches." *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 75(1), a5396 (2019): 1.
- Gandhi, Leela. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Qalam, 2006.
- Joko Priyanto. "Wacana, Kuasa, dan Agama dalam Kontestasi PilGub Jakarta (Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault)." *THAQĀFIYYĀT* 18 (2017): 193.
- Liere, Lucien Van. *Memutus Rantai Kekerasan: Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi dan Terorisme*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Mafrukhi, Rustono, Subiyantoro, Muh. Doyin. "Hegemoni Sosial, Budaya, dan Kekuasaan Wacana Sastra Buku Teks Bahasa Indonesia SMA." In *Ceramah Universitas Negeri Semarang*. Semarang, 2019.
- Mouffe, Ernesto Laclau dan Chantal. *Hegemony and Socialist Strategy (Toward a Radical Democratic Politics)*. New York: Verso, 2014.
- Robert Audi. *The Cambridge Dictionary of Philosophy Second Edition*. New York: Cambridge University Press, 1999.
- Setiawan, Rahmat. "Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak." *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra* VI No. 1 (2018): 14.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. *Can The Subaltern Speak?* Edited by Patrick Williams dan Laura Chrisman. New York: Colombia University Press, 1994.
- Tanner, Kathryn. "Trinity." In *The Wiley Blackwell Companion to Political Theology*, edited by William T. Cavanaugh dan Peter Manley Scott, 368–371. Amerika Serikat: John Wiley & Sons Ltd., 2019.
- Tianto, Yudha. "Doktrin Allah Tritunggal Dari Jürgen Moltmann dan Permasalahannya." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* No. 2 (2013): 160.
- Tiosuta, Fiona Anggraini. "Menelisik Potensi Feminis Para Lelaki." *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 2 (2015): 167.